

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kartu Identitas Anak merupakan program yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai bukti identitas resmi anak dibawah umur 17 tahun juga memberi jaminan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak anak, menjamin akses sarana umum, sehingga dengan begitu akan mempermudah anak dalam memenuhi hak nya.

Berdasarkan hasil dan temuan peneliti pada paparan bab V diatas, bahwa pelaksanaan Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, dikarenakan masih terdapat kendala atau masalah bagi implementor pada saat implemementasi program KIA di Kabupaten Dharmasraya. Berikut faktor penghambat atau kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dalam proses implementasi program KIA yaitu sebagai berikut:

1. Karektaristik Organiasasi Pelaksana

Dalam variabel karektaristik organiasasi pelaksana ini, pada indikator struktur birokrasi masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya struktur birokrasi terkait pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari tidak ada nya struktur birokrasi yang jelas terkait aktor-aktor atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program KIA. di Kabupaten Dahrmasraya, sehingga tidak adanya kejelasan peran dan tugas dari

masing-masing instansi yang terlibat dan juga tidak adanya ketegasan bagi instansi yang tidak ikut atau kurang berpartisipasi selama proses pelaksanaan. Tidak adanya struktur jelas terkait pelaksanaan program KIA ini maka tidak ada sanksi bagi instansi yang tidak berpartisipasi menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pelaksanaan program KIA di Kabupaten Dharmasraya.

Kemudian juga pada pola-pola hubungan organisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tidak melibatkan semua instansi yang terlibat dalam rapat bulanan yang dilakukan.

2. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Pada variabel komunikasi antar organisasi pada indikator koordinasi terdapat kendala masih kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan organisasi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program KIA. Hal ini dilihat dari tidak adanya koordinasi pihak Disdukcapil dengan Camat dan juga Pemerintahan Nagari yang seharusnya pada surat edaran ada.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Adapun kendala terdapat pada indikator kondisi sosial masyarakat, dimana masyarakat masih belum sepenuhnya menerima program ini dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terkait fungsi dan kegunaan dari KIA itu sendiri. Sehingga masih ada anggapan dari masyarakat bahwa KIA ini tidak begitu penting. Sikap

acuh dan abai masyarakat tentang program KIA ini juga menjadi salah satu tolak ukur implementor harus lebih lagi dalam hal memberikan informasi berupa sosialisasi agar persepsi masyarakat mengenai KIA ini sama dengan tujuan yang ingin dicapai implementor. Hal ini juga disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang mana masyarakat harus berhenti bekerja dulu untuk mengurus KIA, sehingga masyarakat terdoktrin bahwa bekerja lebih penting dibanding mengurus KIA.

6.2 Saran

Dalam proses implementasi kebijakan tidak selamanya berjalan mulus dan berhasil seratus persen, karena terdapat kendala atau tantangan selama proses implementasi berlangsung. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja implementor dalam Implementasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Penacatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, maka peneliti mengemukakan beberapa saran kepada implementor yang perlu jadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut

1. Membuat struktur birokrasi program yang jelas pada pelaksanaan implementasi program KIA. Struktur tersebut yaitu struktur antara disdukcapil Kaupaten Dharmasraya dengan instansi yang terlibat seperti Pemerintahan Nagari dan Camat se Kabupaeten Dharmasraya sehingga koordinasi yang terjalin jelas dari implementor sampai kebawah.

2. Komunikasi dan koordinasi implementor dengan instansi yang terlibat harus ditingkatkan lagi, seperti koordinasi dengan Pemerintah Nagari sehingga jelas kedudukan dan peran masing-masing instansi yang terlibat.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mengadakan evaluasi yang melibatkan instansi diluar internal yang dilakukan secara berkala sehingga pelaksanaan program KIA di Kabupaten Dharmasraya lebih terukur lagi.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Dharmasraya harus gencar lagi melaksanakan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham fungsi dan kegunaan dari KIA dan seberapa penting KIA itu berperan bagi anak.

